

	News Title : Bappebti: Harusnya Aturan Bursa CPO Selesai Agustus 2023	
	Media Name : Kompas.com	Journalist : Elsa Catriana
	Publish Date : 03 August 2023	Tonality : Positive
	News Page :	News Value : 0
	Resources : Didid Noordiatmoko (Kepala Bappebti)	Ads Value : 0
	Section/Rubrication : Money	Topic : Bursa CPO

Kompas.com / Money / Whats New

Bappebti: Harusnya Aturan Bursa CPO Selesai Agustus 2023

Kompas.com - 03/08/2023, 19:15 WIB



Kepala Bappebti Kementerian Perdagangan, Didid Noordiatmoko saat jumpa pers di Jakarta, Jumat (3/8/2023). (KOMPAS.com/ELSA CATRIANA)



Penulis: Elsa Catriana | Editor: Yoga Sukmana

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) menyebut Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) tentang bursa CPO bisa selesai digodok pada Agustus 2023. Saat ini aturan akan masuk dalam tahap harmonisasi di Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkumham).

Kepala Bappebti Didid Noordiatmoko mengatakan, pihaknya akan melakukan rapat soal bursa CPO dengan berbagai lembaga dan kementerian. Mulai dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Maritim dan Investasi, Kementerian Pertanian, Kementerian ESDM hingga BPKP.

"Agustus ini harusnya Permendagnya sudah selesai," ujar Didid dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis (3/8/2023).

Baca juga: [Cerita Mendag Zulhas Disindir Jokowi karena RI Tak Punya Bursa CPO](#)

Didid tak menampik peluncuran bursa CPO mengalami keterlambatan dari yang ditargetkan oleh Menteri Perdagangan yakni pada Juni 2023.

Menurut dia keterlambatan itu lantaran semua proses penyusunan bursa CPO dilakukan dengan prinsip kehati-hatian.

"Ini memang kami sangat hati-hati. Teman-teman tahu, Kemendag menargetkan ini bulan Juni kemarin dan kami gagal memenuhi. Betul, sampai sekarang pun masih belum ada target Juni itu memang sudah terlewat," kata Didid.

Baca juga: [Jadi Pesaing Kuala Lumpur, Bursa CPO RI Meluncur Bulan Ini](#)



Lebih lanjut Didid mengatakan, alasan terbesar pemerintah membuat bursa CPO adalah agar Indonesia memiliki harga CPO sendiri dan tidak berpatok pada negara lain. Selama ini Indonesia masih berpatokan pada harga CPO melalui bursa Rotterdam, Malaysia, dan ICDX.

"Sebagai negara penghasil CPO terbesar dunia, agak miris ketika kita tidak memiliki harga acuan tersendiri. Jadi, keinginan utama kita adalah memiliki harga acuan price reference CPO tersendiri, versi Indonesia. Karena ini akan digunakan baik dari sisi hulu maupun sisi hilirnya," pungkas Didid.

Baca berita tanpa iklan, [Gabung Kompas.com+](#)

Baca berita tanpa iklan, [Gabung Kompas.com+](#)

TERPOPULER

- 1 **Jajal LRT Jabodetabek, Jokowi: Kurang-kurang Harus Kita Maklumi**
Dibaca 26,700 kali
- 2 **Sempat Viral Penumpang Berdiri Sesaki Gerbong, Kini Kapasitas KA Bersubsidi...**
Dibaca 8,312 kali
- 3 **Sebanyak 6,7 Juta Orang Sudah Terdaftar sebagai Pembeli Elpiji 3 Kg**
Dibaca 2,406 kali
- 4 **Baru Diluncurkan, Aplikasi GoPay Banjir Review Positif**
Dibaca 2,407 kali
- 5 **MRT dan LRT, Apa Perbedaannya?**
Dibaca 1,406 kali

Baca berita tanpa iklan, [Gabung Kompas.com+](#)

NOW TRENDING



Deret Pelapor Rocky Gerung, Jokowi Tak Ambil Pusing



Detik-detik Tambang Emas Banyumas Bocor, Ada Lubang Bocor dan Air Gede Masuk



Kronologi Pria Tewas Dianiaya 5 Sekuriti Ancol, Diduga Pencuri Padahal Tak Ada Bukti



Sambangi Acara Kecantikan, Anies: Perlu Ngobrol, Apa yang Bisa Dikerjakan dengan Negara